

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan industrial yang cukup pesat. Baik sektor mikro dan makro, kabupaten ini berhasil menjadi salah satu wilayah padat industrial di wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo) salah satunya pada bidang energi (Sumber daya alam). Kabupaten ini secara geografis memiliki kandungan migas (Minyak dan Gas) yang bisa dikatakan cukup di blok brantas terdapat 43 sumur.¹ Hal ini disebabkan wilayah Kabupaten ini terbentuk karena endapan lumpur yang membentuk delta. Kata “Delta” yang dipakai untuk nama supporter hingga wilayah gedung perkantoran dan lain-lain yang secara simbolik menunjukkan tanah Sidoarjo adalah hasil endapan tanah.² Keistimewaan kandungan tersebut seringkali jadi muatan yang luar biasa bagi dunia bisnis salah satunya di dunia pertambangan. Namun, tentu hal tersebut memiliki konsekuensi luar biasa. PT. Lapindo Brantas .Inc merupakan salah satu contoh perusahaan yang terliubat dalam salah satu peristiwa yang merupakan salah satu wajah pertambangan nasional di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peristiwa bencana semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serta memerlihatkan wajah pertambangan nasional. Hal tersebut menyebabkan beberapa masalah baik politik, ekonomi, maupun sosial. Dalam dunia internasional, komoditas ini bisa menjadi sesuatu akar permasalahan yang

¹ Collapse, T. R. (2010). *Java Collapse : Dari Kerja Paksa Hingga Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: Insistpress. Hal 167

² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, kata “Delta” memiliki arti endapan tanah yang terbentuk di muara sungai.

menentukan adanya perang baik dagang maupun fisik, hal ini karena minyak dan gas adalah salah satu sumber bahan bakar utama hingga kini dalam menjalankan roda-roda kehidupan bahkan salah satunya adalah sumber kekuatan kendaraan-kendaraan perang. Salah satunya, perang sipil, ia merupakan sebuah agenda yang mengubah minyak dan gas dengan yang semula dijual dengan harga yang murah menjadi tidak terjangkau. Selain itu, sumber daya alam ini merupakan salah satu alasan bangkitnya Liberalisme dan Kapitalisme, seperti Maurice Clark dan Rockefeller sukses dalam melakukan ekspansinya dalam produksi perminyakan serta memonopoli komoditas eksplorasi sumber daya alam. Sejarah perjalanan monopoli komoditas tersebut yang dilakukan Rockefeller ini sebagai cerminan atas perusahaan eksplorasi yang dimiliki oleh Abu Rizal Bakrie.³ Jejak bisnisnya yang ditempuh oleh Abu Rizal menjadi sebuah pengalaman yang mampu memangkas hambatan yang ada, salah satunya dalam pengalihan aset. Pengalihan aset yang dilakukan Bakrie menjadi instrumen ampuh dalam menyelamatkan kegiatan bisnisnya.

Pembahasan tentang apakah memang semburan lumpur ini disebabkan karena sebuah rentetan bencana atau apakah ada unsur kegagalan prosedural dalam perhitungan eksplorasi? Pasaunya, sebelum dinyatakan meluap, semburan lumpur tersebut, telah terjadi gempa bumi di Yogyakarta. Gempa yang berkekuatan 2 SR tersebut dipakai sebagai salah satu penyebab terjadinya semburan lumpur di titik pengeboran. Beberapa Ahli geologi juga berpendapat bahwa gempa yang terjadi di Yogyakarta tersebut tidak mampu mempengaruhi perubahan lempengan di Jawa Timur, apalagi kekuatan gempanya hanya 2 SR beda hal nya ketika kekuatan gempa 6 SR mungkin akan bisa mempengaruhi.⁴ Semburan lumpur, air bercampur gas pertama kali terjadi beberapa titik semburan muncul di beberapa lokasi.⁵ Dari kondisi yang kian parah ini Timnas penanggulangan lumpur juga hanya membangun tanggul saja tanpa berupaya menganalisis lebih jauh untuk menghentikan atau memperlambat semburan.

³ Akbar, A. A. (2007). *Konspirasi Di Balik Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: Galangpress. Hal 80

⁴ Nurcahyo, H. (2014). *Rekayasa Dongeng Dalam Bencana Lumpur Lapindo*. Jawa Timur: Asosiasi Tradisi Lisan. Hal 66

⁵ Akbar, A. A. (2007). *Konspirasi Di Balik Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: Galangpress. Hal 79-83

Perdebatan apa yang menyebabkan semburan tersebut terjadi masih belum menemui titik terang secara ilmiah. Menurut Azhar, selain penyebab alamiah penyebab semburan, ia berpendapat bahwa ada muatan kepentingan baik ekonomi maupun politik di peristiwa ini.⁶ Organisasi profesional dan keilmuan salah satunya IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia, BPPT (Badan Perencanaan dan Penerapan Teknologi), ASPERMIGAS (Asosiasi Perusahaan Migas Nasional), dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) terlibat dalam forum yang diselenggarakan di Club Bimasena oleh ASPERMIGAS dengan tema “Semburan Lumpur Panas Sidoarjo”. Beberapa para ahli perminyakan hadir dalam forum tersebut dengan pandangan bahwa adanya alternatif jawaban terkait semburan lumpur di Sidoarjo. Dalam forum tersebut muatan politik yang terlihat adalah dengan melibatkan penyelenggara dan para wakil rakyat asal desa masing-masing baik dari area terdampak maupun luar area terdampak. Adapun beberapa pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut oleh para perwakilan, antara lain;⁷ pertama, tuduhan terhadap Tim Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo bahwa mereka tidak efektif dan efisien dalam pengerjaan penanggulangan. Hal tersebut digarisbawahi dalam peristiwa ini mereka hanya mengambil kepentingan proyek saja. Kedua, adapun pemaparan dari GNG (*Geological and Geophysics*) bahwa gambaran untuk menghentikan semburan lumpur jauh dari kata optimis. Dengan gambaran seperti itu, para wakil rakyat lebih menekankan kepada penggunaan dana penanggulangan lebih diprioritaskan kepada rakyat yang tertimpa.

Asumsi ekonomi politik tentu berbicara tentang bagaimana bisa mendapatkan untung besar namun, dengan usaha seminimal mungkin.⁸ Bakrie dihadapkan permasalahan yang cukup rumit, yakni ia menjadi pemilik saham mayoritas pada proyek PT. Lapindo Brantas .Inc disisi lain, ia harus membayar kerugian atas luar kehendaknya dan pinjaman dari pemerintah. Dalam peristiwa semburan lumpur ini, Bakrie berupaya untuk mendapatkan posisi aman dalam

⁶ Akbar, A. A. (2007). *Konspirasi Di Balik Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: Galangpress. Hal 80-81

⁷ *Ibid*

⁸ Mutfi, M. (2018). *Ekonomi Politik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA. Hal 1-2

bisnisnya tentu ia akan mengupayakan apapun untuk meminimalisir atas kerugian yang ada, salah satunya posisi strategis dalam dunia politik agar memengaruhi kebijakan yang ada dengan instrumen yang tersedia. Jabatan yang ia emban adalah Menteri Perdagangan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian sejak meletusnya peristiwa tersebut, ia diganti dan dijadikan sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan. Asumsi-asumsi permainan regulasi yang taktis tentu merupakan salah satu alternatif untuk mengembalikan kerugian ia dapat dalam peristiwa semburan lumpur ini.

Timnas penanggulangan lumpur lapindo yang dibentuk bertujuan untuk menangani pada awal perluasan semburan lumpur, mulai kewalahan dengan situasi yang ada dan segera untuk memenuhi tuntutan warga atas ganti rugi rumah dan tanah yang sudah tenggelam. Kemudian, fokus atas tuntutan ganti rugi tersebut juga harus terpecah dengan pembenahan ruas jalan Tol yang kondisi setiap harinya mengalami keretakan. Beberapa sikap pemangku kepentingan juga turut hadir seperti Presiden SBY yang mewajibkan PT. Lapindo Brantas untuk membayar uang kompensasi ganti rugi lahan rakyat sebesar Rp. 2,5 Triliun. Kemudian, sikap dari Ketua Komisi V DPR RI yang juga mendesak pemerintah agar mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur umum yang rusak akibat lumpur ini.⁹ Walaupun dinilai sikap ini kurang bijak karena akan membuat negara terseret hutan kembali mengingat biaya-biaya yang harus dikeluarkan akibat semburan lumpur ini cukup besar.

Pembahasan mengenai cara penanggulangan lumpur yang mana terdapat masalah yang cukup kompleks, selain bencana lumpur itu sendiri juga bencana sosial yang menyelimutinya, seperti relokasi warga terdampak ke tempat pengungsian. Proses penanggulangan bencana tersebut dengan metode ekstrim bisa dikatakan *extraordinary*, seperti dibuang di Kali Mati dan Kali Porong. Disisi lain, kemungkinan dana dari perusahaan tidak dapat memenuhi ganti rugi ke warga terdampak, maka yang terjadi adalah penanganan yang terkesan lambat dan kemudian hari akan menimbulkan konflik horizontal. Kemungkinan juga timbul

⁹ Akbar, A. A. (2007). *Konspirasi Di Balik Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: Galangpress. Hal 38

konflik sosial antar warga di masing-masing desa yang mulai memanans karena saling ingin menyelematkan diri.

Sudut pandang yang diambil haruslah lebih luas karena keputusan tertinggi ada pada tiga pemegang saham terbesar dari PT. Lapindo Brantas Inc. Ketiganya adalah PT. Energi Mega Persada milik Bakrie yang menguasai 50% saham, PT. Medco Energi .Tbk milik Panigoro menguasai 32% saham dan PT. Santos Brantas Indonesia .Tbk yang menguasai 18% saham.¹⁰ Disini kemudian tidak bisa kita hindarkan adanya skema dalam pengeboran yang tidak sesuai dengan analisis AMDAL yang sudah ditetapkan. Dengan dalih yang memungkinkan salah satunya menghemat biaya pengeluaran operasional. Ada nama-nama kelompok atas respon dari kebijakan Perpres 14 tahun 2007 yang mengatur status masyarakat dan PT. Lapindo Brantas .Inc menjadi relasi penjual dan pembeli. Dalam Perpres ini juga mekanisme pembayaran tunai atau dicicil mendapat perlawanan dari kelompok masyarakat tersebut.

Peneliti tertarik pada bagaimana aktivitas dari PT. Lapindo Brantas .Inc yang terkait dengan eksplorasi alam di wilayah blok brantas mengandung beberapa pelanggaran yang diyakini adanya peran negara dan segelintir elite dalam menangani bencana semburan lumpur membuat keadilan semakin samar. Dalam konsep dominasi terdapat tiga elemen yakni: pertama, kondisi kekuasaan yang tidak seimbang, ketergantungan, dan ketidakpatuhan. Dalam analisisnya jurnal ini memberikan gambaran bahwa pelaku atau subjek dominasi adalah negara dan PT. Lapindo Brantas .Inc. Sementara masyarakat Kabupaten Sidoarjo disekitar area PT. Lapindo Brantas .Inc adalah objek dominasi. Dalam relasinya PT. Lapindo Brantas .Inc dengan negara terjadi hubungan yang sangat kuat antar keduanya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan negara jauh lebih menguntungkan pihak korporasi. Negosiasi yang dilakukan korban lumpur lapindo sebagai aksi kolektif. Status yang diberikan negara atas semburan lumpur panas yang terjadi di Sidoarjo dari mulanya kesalahan perusahaan menjadi bencana alam, membuat masyarakat harus menerima nasib sebagai korban bencana. Namun, hal ini

¹⁰ Akbar, A. A. (2007). *Konspirasi Di Balik Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: Galangpress. Hal 33

kemudian tidak serta merta diterima begitu saja, beberapa aksi kolektif dan demonstrasi menuntut ganti rugi terus dilakukan.

Negosiasi ganti rugi lahan dan perumahan yang awalnya dituntut sebesar Rp. 2.500.000 permeter persegi tidak disepakati PT. Lapindo Brantas. Inc, usulan kemudian muncul pihak korporasi dengan harga Rp. 1.500.000 permeter persegi untuk lahan perumahan.¹¹ Dalam hal tuntutan ganti rugi lahan kemudian muncul Perpres Nomor 14 Tahun 2007 yang mengubah relasi antara masyarakat dengan pihak korporasi menjadi relasi penjual-pembeli. Setelah adanya payung hukum ini tidak serta merta masyarakat menjadi terpenuhi haknya. Hal ini kemudian melibatkan proses negosiasi kolektif yang panjang sampai tokoh masyarakat Emha Ainun Najib (Cak Nun) membuat skema "sumpah".¹² Bagi masyarakat, Sumpah dilakukan di depan para pemangku kepentingan dan disaksikan warga atas kepemilikan tanah dengan tanda tangan dan stempel resmi dari pemerintah daerah setempat. Walaupun terjadi proses negosiasi yang panjang dan satu suara atas tuntutan yang dilayangkan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu, pemerintah mengatur skema pembayarannya menjadi 20% tunai dan 80% cicilan.

Menurut urgensi peneliti, ekonomi politik antara perusahaan dan negara menjadi pembahasan yang relevan di masa yang akan datang dan akan terus berevolusi dengan variasi yang bermacam-macam. Hal tersebut akan menjadi pembahasan yang kaya namun, akses terhadap penelitian, kecenderungan akan berubah. Pengawasan terkait dengan ekonomi politik akan terus berkembang, namun banyak hambatan bagi para peneliti untuk mengelola data yang ada di lapangan. Artinya, pembahasan ekonomi politik akan cenderung tidak memuaskan karena antara pasar dan negara dapat diasumsikan terus berusaha menutup ruang-ruang tersebut agar proses-proses baik ekonomi dan politik semakin minim. Kemudian, ketidakpuasan peneliti pada pergeseran penggunaan hanya secara

¹¹ Nurcahyo, H. (2014). *Rekayasa Dongeng Dalam Bencana Lumpur Lapindo*. Jawa Timur: Asosiasi Tradisi Lisan. Hal 55

¹² Akbar, A. A. (2007). *Konspirasi Di Balik Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: Galangpress. Hal 15-22

praktis dalam ekonomi politik kepada keberpihakan dalam peran dan posisi mereka dalam hubungan antara pasar dan negara.

Dalam keberpihakan antara negara dengan pasar tentu disisi yang paling terdampak adalah masyarakat. Kegiatan ekonomi mereka juga terhambat, beberapa warga memanfaatkan kejadian ini sebagai mata pencaharian mereka, salah satunya adalah kegiatan jasa ojek di area semburan lumpur. Meminjam akun Youtube yang bernama Winner Wijaya, ia membantu masyarakat melalui media daring tersebut dengan membuat film dokumenter. Film pendek tersebut berjudul Ojek Lusi. Akun tersebut menjelaskan bahwa beberapa bagian warga mencari punid-pundi kehidupan melalui kegiatan ojek. Kemudian, pada awal semburan lumpur pulih, mereka menjual DVD terkait bagaimana semburan lumpur tersebut terjadi hingga pulih.¹³ Dalam DVD tersebut memperlihatkan bagaimana semburan tersebut secara kronologis bagaimana awal hingga kondisi pulih secara bertahap.

Gambaran dari film dokumenter tersebut memperlihatkan bahwa warga kehilangan kampung halamannya, kegiatan ekonominya hingga kehidupan sosialnya secara langsung direnggut oleh semburan lumpur. Seperti yang dilansir oleh laman berita <https://surabaya.bisnis.com/>, bahwa warga memiliki semangat tinggi terhadap kampung halamannya serta mereka memperlihatkan kegigihannya untuk peduli terhadap apa yang terjadi hingga mereka menjadikan kegiatan ojek di area semburan lumpur tersebut sebagai sumber-sumber ekonomi mereka.¹⁴ Jasa ojek tersebut mau tidak mau menjadi kegiatan utama sampai hingga kini yang dimanfaatkan oleh beberapa warga tersebut membentuk dan tergabung dalam sebuah paguyuban ojek semburan lumpur.

¹³ Hasil keterangan dari Akun Youtube oleh Winner Jaya dengan judul “*Ojek Lusi*” diunggah pada 29 Mei 2022

¹⁴ <https://surabaya.bisnis.com/read/20190603/531/930168/mengais-rezeki-dari-lumpur-lapindo> [Daring] Diakses pada tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 16.11 WIB

1.2 Rumusan Masalah

1. Siapa saja yang terlibat dalam penentuan terhadap perubahan status lumpur Lapindo?
2. Sumber-sumber ekonomi politik seperti apa yang diperebutkan dalam perubahan status Lumpur Lapindo tersebut?
3. Dampak seperti apa yang diakibatkan perubahan status semburan lumpur Sidoarjo kepada masyarakat yang terdampak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Dampak Ekonomi Politik Perubahan Status Lumpur Lapindo Menjadi Status Bencana Alam Kepada Masyarakat Terdampak di Kabupaten Sidoarjo Pada Masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” ini memiliki tujuan berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diyakini dapat mengidentifikasi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini berguna untuk mengetahui seperti apa, dan bagaimana situasi sosial maupun politik yang ada terhadap perubahan status Lumpur Lapindo pada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
2. Tujuan penelitian ini berguna untuk mengetahui dampak dari keputusan dan kebijakan apa yang dikeluarkan Pemerintah dalam Perubahan status Lumpur Lapindo pada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
3. Tujuan penelitian ini berguna untuk mengetahui tentang sumber-sumber ekonomi politik seperti apa yang akan diraih oleh siapa saja dalam masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
4. Tujuan penelitian ini berguna untuk mengetahui dampak yang dialami masyarakat terdampak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yakni secara konseptual dan teoritis. Keduanya dapat memperkaya referensi baik ekonomi, politik maupun sosial yang terjadi di Indonesia. Secara akademis, manfaat penelitian dapat

memberikan baik masukan, kritik, saran maupun pandangan peneliti. Terutama dalam pembahasan permasalahan sumber-sumber ekonomi politik terhadap perubahan status Lumpur Lapindo yang menimbulkan dampak dari adanya baik politik serta sosial antara pemerintah pusat, perusahaan, dan masyarakat.

Gambaran umum penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan mengenai perubahan status Lumpur Lapindo sehingga ia dapat diformulasikan sebagai referensi penelitian hingga kebijakan dan keputusan lainnya yang berkaitan. Kemudian, peneliti berharap, bahwa manfaat penelitian dapat memberikan pemahaman dalam perumusan kebijakan dalam sebuah usaha penyelesaian yang disebabkan sumber-sumber ekonomi politik melalui sebuah proses politik.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, bahwa adanya definisi konseptual yang dibentuk dalam kerangka rumusan masalah adalah menghindari ketidakjelasan fokus penelitian. Definisi konseptual ini diharapkan dapat memahami permasalahan yang ada pada rumusan masalah sehingga definisi konseptual bisa ditekankan atau dikaitkan kembali melalui kerangka konsep sebagai berikut:

1.5.1 Status Lumpur Lapindo Menjadi Lumpur Sidoarjo

Dalam penentuan status lumpur lapindo ini, secara umum peneliti ketahui bahwa penentuan ini menuai polemik antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang terdampak. Perdebatan antara apakah peristiwa lumpur lapindo ini sebuah kegagalan manusia atau disebabkan bencana alam yang dimana dikaitkan dengan gempa di selatan pulau Jawa yang terjadi sebelum peristiwa ini terjadi. Perdebatan penentuan peristiwa ini tentu akan memakan biaya yang cukup banyak serta keterlibatan para pemangku kepentingan yang layak andil. Selain itu, pemerintah, menurut peneliti, dapat dikatakan cenderung mencari posisi yang aman dalam memberikan regulasi bahkan proses-proses politik yang cenderung syarat akan kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan ini merupakan tanggung

jawab negara yang mengontrol apa yang mereka investasikan di dalam negara baik dari dalam kebijakan maupun proses-proses yang dikatakan negara harus hadir.

Posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat dilemma dikarenakan beliau merupakan pemenang atas pemilu namun, koalisi dalam pihaknya secara kuantitas jauh dibandingkan pihak oposisi yang berada di parlemen.¹⁵ Hal ini menjadi hambatan beliau karena kebijakan yang akan dikeluarkan yang sifatnya penting akan terhambat dengan adanya persetujuan parlemen. Artinya, kebijakan dan regulasi yang sifatnya penting olehnya dalam ruang politik yang sangat perhitungan ini maka, upaya mengeluarkan Kerpres merupakan langkah yang akan beliau ambil. Hal ini juga akan memangkas banyak waktu dan juga tidak semudah itu untuk meminta bantuan parlemen. Yang sangat disayangkan kemungkinan kedepannya adalah rente dan ongkos politik yang berbicara di lapangan. Kemudian, peneliti berargumen bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh Presiden tidak lain yang cenderung mencari startegi yang aman adalah salah satu upaya konsolidasi dengan para *stakeholder* baik parlemen, pihak perusahaan, dan elemen masyarakat bahwa dalam peristiwa ini butuh nominal yang besar dalam proses penanganannya. Tentu dalam konteks ini nominal merupakan wujud nyata dari kontrol *public goods* yang kemudian akan menjadi motivasi bagi elite politik hingga elite ekonomi untuk masuk kedalam peristiwa ini agar mendapatkan sumber-sumber ekonomi politik yang ada.

1.5.2 Sumber-Sumber Ekonomi Politik

Penduduk Kabupaten Sidoarjo tentu mengucapkan terimakasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas keputusan forum pertemuan yang diwakilkan yang diantaranya Presiden dan jajarannya beserta kehadiran Cak Nun.¹⁶ Dalam pertemuan itu Presiden mengharapkan ada keputusan yang terdiri dari tiga hal, antara lain, pertama, penduduk yang terdampak diberikan ganti rugi

¹⁵ Akbar, A. A. (2007). *Konspirasi Di Balik Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: Galangpress Hal. 29-34

¹⁶ Akbar, A. A. (2007). *Konspirasi Di Balik Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: Galangpress Hal. 12-13

sesuai apa yang telah disepakati. Kedua, pemberian intensif kepada infrastruktur negara dikarenakan para pengusaha terhambat akses lokasi yang cukup sulit karena peristiwa ini. Ketiga, ikuti dan jalankan Keputusan Presiden No. 14 tahun 2007.

Pada awalnya Perpres yang dikeluarkan pemerintah belum mengamini ganti rugi dikarenakan pihak Lapindo tidak ingin membayar sesuai dengan apa yang disepakati.¹⁷ Hal tersebut membuat pemerintah berujung pada keterpaksaan untuk membantu membayar ganti rugi korban Lumpur Lapindo dengan catatan diluar area semburan lumpur lapindo yang terdampak dan kemudian memberikan pinjaman kepada PT. Lapindo Brantas .Inc. Disisi lain, tanggungjawab pemerintah adalah rakyatnya yang tertimpa musibah. Selain itu, pemerintah terlihat cenderung bermain aman.¹⁸ Beberapa kali, perusahaan menunda pembayaran terkait dana pinjaman yang diberikan oleh pemerintah. Ketidakberdayaan yang ditunjukkan dalam penundaan pembayaran oleh perusahaan ini cenderung mengherankan, karena Perpres tersebut justru meringankan beban PT. Lapindo Brantas. Inc. Selain itu, keputusan tersebut juga cenderung akan menjadi celah kedepannya karena ketidakmampuan dalam upaya penyelesaian peristiwa ini bahwa status peristiwa ini akan menjadi target utama dalam proses panjang selanjutnya agar konsekuensi kepada korporasi tidak menjadi berat.

Kemudian dalam Perpres ini, Perpres melahirkan BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) yang bertugas upaya penanggulan semburan lumpur, masalah sosial dan infrastruktur, dan memerhatikan resiko lingkungan.¹⁹ BPLS ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dimana terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Kemudian, pembiayaan yang dibeban PT. Lapindo Brantas. Inc, seperti membeli tanah dan bangunan masyarakat secara bertahap serta dibayar 20% paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 tahun habis tertera dalam Perpres No. 14 tahun 2007. Pembiayaan selanjutnya yang tercantum dalam Perpres ini antara lain; biaya masalah sosial

¹⁷ *Ibid.* Hal. 28

¹⁸ *Ibid.* hal 29-34

¹⁹ Perpres No. 14 Tahun 2007

kemasyarakatan dibebankan pada APBN, namun yang hanya terkena dampak diluar lingkungan area, biaya tanggul utama sampai kali porong di tanggung oleh perusahaan, biaya penanganan ditanggung pemerintah dari APBN.

Dari segi jabatan, jajaran inti dari BPLS, yaitu Menteri Pekerjaan Umum sebagai kepala BPLS dan Menteri Sosial sebagai wakil kepala BPLS.²⁰ Hal ini tidak menjadi sebuah permasalahan namun, pada tahapan selanjutnya Menkokesra dijabat oleh Bakrie yang dimana ia selaku Menko Perekonomian yang terlihat cenderung kurang optimal sekaligus ia memiliki saham mayoritas di PT. Lapindo Brantas. Inc.²¹ Namun, selain anekdot ketidakoptimalan tersebut, tersirat bahwa posisi Menko Perekonomian kurang menarik lagi dalam upaya pengamanan bisnisnya. Hal tersebut bisa demikian rupa dikarenakan posisi strategis kedepan adalah Pilres 2014 dan pundi-pundi uang yang harus diraup untuk modal dengan mengorbankan berbagai macam hal. Kemudian, jabatan ini oleh Bakrie agar membersihkan namanya, ia melakukan upaya kuat untuk memberikan citra bahwa ia peduli dengan rakyat dan dekat rakyat dari programnya serta terjun lapangan langsung.²²

Disisi lain, kebijakan tentang jabatan BPLS terkait kepala dan wakil kepala nahwa berhalangan tetap berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tindak pidana lainnya; atau ,mengudurkan diri.²³ Hal ini menunjukkan bahwa masuknya Bakrie sebagai wakil kepala BPLS tidak lain untuk membantu mengelola dana ganti rugi ini. Negatifnya, posisinya sebagai pemilik saham mayoritas di PT. Lapindo Brantas. Inc dalam sudut pandang politik tentu hal ini menjadi lahan basah baginya untuk mengamankan bisnisnya dengan melalui negara memainkan APBN sebagai pemenuhan kebutuhan bisnis dan politiknya.

²⁰ Akbar, A. A. (2007). *Konspirasi Di Balik Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: Galangpress. Hal. 26-28

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ Kepres No. 14 Tahun 2007

Dana pinjaman serta APBN menjadi dua sumber yang menurut peneliti akan menjadi perebutan. Keduanya tentu memiliki tingkat keuntungannya masing-masing. Negara akan mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut melalui bunga pinjaman. Kemudian, jaminan dari pinjaman tentu tanah yang berada di area yang telah dibebaskan baik area terdampak maupun di luar area terdampak. Disisi lain, adanya APBN menjadi keuntungan sendiri bagi PT. Lapindo Brantas .Inc karena dana pinjaman juga berasal dari APBN. Artinya, bahwa negara ikut serta membantu biaya-biaya penanggulangan. Selanjutnya, PT. Lapindo Brantas .Inc dapat memainkan melalui distribusi dana tersebut dengan pola permainan nominal. Kemudian, untuk mendistribusi dana ganti rugi tersebut PT. Lapindo Brantas .Inc harus terus melakukan kegiatan eksplorasinya maka, ia membentuk PT. Minarak Lapindo Jaya agar menjadi fasilitator distribusi ganti rugi tersebut kepada warga terdampak. Pada akhirnya, hak kepemilikan dari perusahaan dialihkan kepada negara, bukan hanya sekadar persoalan mengambil alih hak kepemilikan saja namun, negara juga berusaha mereduksi kegagalan pasar dengan intervensinya dalam kebijakan yang dibuat dalam peristiwa ini.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Ekonomi Politik Neoklasik

Berbicara ekonomi tidak bisa lepas dari pengaruh tiga tokoh besar, yaitu Adam Smith, Karl Marx, dan John M. Keynes. Ketiganya memiliki penekanan yang berbeda-beda dalam sudut pandangnya. Adam Smith lebih menekankan kepada individu sebagai ide utama yang kemudian berujung pada kapitalisme pasar persaingan sempurna. Disisi lain, Karl Marx melihat negara sebagai aktor utama dalam menentukan mekanisme pasar. Gagasan sosialisme ini berbicara bahwa negara memiliki peran yang lebih terhadap pasar. Sedangkan Keynes, atau dikenal dengan ekonomi keynessian, ia menekankan bahwa negara dan pasar harus bersama untuk mereduksi kegagalan dan saling melengkapi satu sama lain agar terciptanya keadilan ekonomi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ekonomi politik pendekatan neoklasik, pemikiran ekonomi politik neoklasik terletak pada ide utamanya, yakni konsep pilihan yang dibatasi (*constrained choice*).²⁴ Konsep ini memandang individu sebagai pelaku yang membuat pilihan serta harus memilih beberapa alternatif tindakan berdasarkan pandangan atau imajinasinya secara subjektif. Para ekonom berasumsi bahwa, pertama, manusia akan selalau berusaha untuk mencapai level kepuasan (*happiness*) masing-masing dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Kedua, berbagai barang (*public goods*) yang berbeda semuanya sama-sama menghasilkan satu dampak yang sama, yakni kepuasan (*satisfaction*) atau kegunaan (*utility*).

Dalam pemikiran ekonomi pendekatan neoklasik ini menekankan pada, pertama, motivasi manusia yang dimana mereka akan menentukan dan melakukan segala tindakannya agar mereka dapat mencapai level kepuasan mereka (*happiness*). Kedua, dalam mencapai kepuasan mereka, tentu mereka akan membuat urutan pilihan (*preferences ordering*) yang akan menghasilkan beberapa alternatif pilihan agar mencapai peringkat paling tinggi. Ketiga, kemudian dalam pengambilan keputusan mereka akan memertimbangkan pilihan mereka dengan istilah (*rational choice*). Disisi lain, permasalahan yang ada dalam yang dihadapkan mereka pada alternatif pilihan ini, yaitu pertama, situasi yang mendesak (memaksa atau terpaksa) (sifatnya tidak eksklusif). Kedua, situasi dilemma karena mereka memiliki pilihan yang diinginkan atau dicapai semua (sifatnya eksklusif).²⁵

Perbedaan antara kedua situasi tersebut terletak pada faktor kelangkaan (*Scarcity*).²⁶ Kelangkaan adalah faktor yang dimana apabila sebuah pilihan yang tidak bisa tercapai karena ketidak ketersediaan *public goods*. Kemudian, kelangkaan juga menjadi salah satu syarat dari pilihan baik individu maupun kelompok agar pilihan mereka tepat. Disisi lain, kelangkaan juga bisa bermakna

²⁴ James A. Caporaso & David. P Levine. 2015. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 184-185

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

bahwa mereka telah mendapatkan dan menggunakan semua yang mereka dapat namun, mereka belum terpuaskan. Maka, kelangkaan ini juga akan memotivasi mereka agar mendapatkan lagi *public goods* yang sifatnya dapat diperoleh lebih dari satu pemenuhan kebutuhan. Aliran neoklasik ini juga memiliki kesulitan, seperti penentuan wilayah di kehidupan sosial dan dapat dikatakan sebagai ekonomi. Hal ini dipandang bahwa wilayah ekonomi dan kehidupan sosial tidak memiliki perbedaan. Artinya aliran neoklasik ini tentu akan berdampingan dengan wilayah interaksi sosial.

Pendekatan neoklasik ini juga tidak sepenuhnya mengamini upaya optimalisasi kebutuhan individu. Yang artinya, aliran neoklasik juga berbicara tentang kesejahteraan kelompok. Hak tersebut dikarenakan bahwa kelompok terdiri dari individu-individu yang memiliki tujuan yang sama. Kesejahteraan ini juga hanya bisa terjadi apabila dua syarat telah terpenuhi.²⁷ Pertama, tindakan pemenuhan kebutuhan individu dalam kelompok bisa memberikan dampak pada individu lain di dalam kelompok walaupun individu lain dalam kelompok tersebut tidak melakukan tindakan yang sama. Syarat ini memiliki dua dampak, yakni positif dan negatif. Positif, apabila tindak konsumsi yang dilakukan dapat memengaruhi individu lain. Negatif, apabila dalam tindakan tersebut peningkatan kesejahteraan hanya pada individu saja dengan merugikan bahkan mengorbankan individu lainnya. Dalam aliran neoklasik, kedua dampak (positif dan negatif) adalah *externalities*. Kedua, adanya kegiatan pertukaran dalam kelompok tersebut dengan menyediakan peluang-peluang agar terjadi peningkatan kesejahteraan kelompok.

Konsep kesejahteraan kelompok memiliki arti bahwa transaksi secara sukarela yang berlandaskan pilihan rasional (*rational choice*) individu. Transaksi secara sukarela dalam konsep ini merupakan akad data persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih yang berusaha saling menguntungkan satu sama lainnya baik individu maupun kelompok berlandaskan hak kepemilikan.

²⁷ James A. Caporaso & David. P Levine. 2015. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 189-190

Istilah sebuah pasar yang “sempurna” merupakan kondisi tertentu dimana para pelaku sebagai mayoritas yang kemudian *public goods* memiliki harga yang menimbulkan peningkatan kesejahteraan ketika dapat dipertukarkan.²⁸ Apabila harga sifatnya fleksibel, maka para pelaku akan berusaha merumuskan harga yang sesuai dengan peningkatan kesejahteraan terhadap semua pihak. Asumsi dari proses pasar bebas ini yang akan menjadi sebuah kesejahteraan sosial yang optimal, seperti apa yang diungkapkan para ekonom bahwa kesejahteraan kelompok ini dinamakan sebagai “Optimalitas Pareto”, yakni pencetusnya adalah Vilfredo Pareto.²⁹

Optimalitas Pareto ini merupakan sebuah pandangan yang melihat konsekuensi sosial dapat berlandaskan pilihan-pilihan subjektif para individu.³⁰ Ada implikasi penting dari pandangan ini, yakni kapan pasar dapat menjadi barometer pola-pola konsumsi dari kelompok. Artinya, hubungan antara optimalisasi dengan kebebasan pasar. Maka, kriteria Pareto ini memiliki argumen yang kuat bahwa alokasi sumber daya dari sekelompok individu dapat menggunakan mekanisme pasar dengan tujuan pengaturan kegiatan produksi dan distribusi dalam masyarakat. Adapun asumsi-asumsi dalam Optimalitas Pareto, yaitu³¹ pertama, pasar bisa memiliki persaingan sempurna. Kedua, kesejahteraan sosial berdasarkan pada definisi pilihan individu. Ketiga, distribusi sumber daya akan menjadi penilaian tentang kesejahteraan.

Pandangan ekonomi politik pendekatan neoklasik melihat bahwa perkonomian jauh lebih efektif dan optimal apabila *public goods*, seperti modal, jasa, dan barang tidak terkontrol oleh regulasi yang ada.³² Keefektifan serta kondisi optimal tersebut terjadi apabila kepemilikan dari baik individu maupun kolektif yang menggunakannya dengan mekanisme yang bertujuan untuk akumulasi dari laba pribadi agar menggerakkan pasar secara sempurna. Pada titik

²⁸ James A. Caporaso & David. P Levine. 2015. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 192-193

²⁹ *Ibid.* Hal 193-194

³⁰ *Ibid.* Hal 194

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* Hal 196-198

puncak inilah kepuasan baik individu maupun kolektif dalam mencapai keuntungan atas kepemilikan menjadi sebuah nilai mereka. Kemudian, hal tersebut dapat diatasi dengan penanaman modal (investasi) yang sifatnya privat. Kemungkinan variabel investasi ini berdasarkan pada tabungan (*savings*) serta penghasilan pribadi (*income*). *Income* ini dapat bekerja dengan adanya akumulasi laba yang wujudnya seperti barang, jasa, modal (investasi), keterampilan, dan lain-lain. Maka, kenaikan akumulasi laba tersebut berujung pada investasi yang diyakin dapat memberikan keuntungan berlipat ganda secara berkelanjutan yang difatnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hal tersebut menjadi sebuah siklus dengan usaha-usaha yang diupayakan baik individu maupun kolektif secara disiplin. Pada titik ini, pemerintah tidak dapat intervensi terkait dengan *income* yang disebabkan wewenang penuh kepemilikan mereka baik individu maupun kolektif. Dalam hal ini hambatan dari pandangan ekonomi neo-klasik ini menolak adanya pajak (retribusi) baik terhadap individu maupun kolektif.

Meminjam Caporaso dan David, bahwa siklus ini dalam pandangan ekonomi politik neo-klasik merupakan sebuah kegiatan usaha-usaha (ekonomi) yang bertujuan untuk kepuasan dari mereka yang telah berupaya mendapatkan *income* dengan prinsip sukerela.³³ Posisi pasar dalam perspektif ini, ia sebagai wadah (institusi) yang menyediakan pemenuhan yang telah diupayakan agar kepemilikan dan kekayaan dapat diolah secara mandiri. Kemudian, pandangan ini juga berbicara bagaimana kegagalan pasar yang terjadi berdasarkan faktor, yaitu faktor eksternalitas, *public goods* yang tidak diproduksi oleh pasar, dan adanya oligopoli.³⁴ Ketiganya diasumsikan sebagai hambatan bagi pasar. Maka, berdasarkan hambatan pasar tersebut, pandangan ini membutuhkan agenda politik.³⁵ seperti, pertama, keamanan hak kepemilikan agar kegiatan usaha-usaha yang diupayakan dapat berjalan lancar. Kedua, pengaturan pihak-pihak yang

³³ James A. Caporaso & David. P Levine. 2015. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ James A. Caporaso & David. P Levine. 2015. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 200-201

memiliki pengaruh dan wewenang secara langsung dan tidak langsung oleh kegiatan usaha-usaha tersebut dengan syarat tetap tidak terlibat dalam transaksi.

Pandangan ekonomi politik neo-klasik ini merupakan ancaman oleh sistem ekonomi komunisme, bahwa kebijakan yang tertutup terhadap pasar ini memberikan dampak buruk bagi sebuah negara maka, langkah untuk membuka diri terhadap pasar tidak dapat dicegah. Kemudian, daya saing ekonomi akan lebih menarik lagi disebabkan prinsip ekonomi politik neoklasik memberikan ruang pasar sebebas-bebasnya. Negara tentu akan membuka upaya untuk deregulasi kebijakan pajak serta menempatkan *welfare state* dalam posisi yang jauh lebih rendah. Artinya hampir tidak alternatif yang membendung pasar bebas ini. Maka seolah-olah negara terperangkap dan akan tereduksi perannya serta patuh terhadap pasar. Oleh karena itu, ekonomi politik neoklasik ini dapat berjalan apabila sebuah negara memiliki regulasi atau pengaturan-pengaturan yang mudah ditebak dan diintervensi antara elite ekonomi dan pemerintah dengan bekerja sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing. Disisi lain, pandangan neo-klasik ini tidak mudah juga berkembang di negara berkembang, seperti Indonesia, atau yang dimana sebuah negara meletakkan pembangunan ekonomi dan politik sebagai landasan kerja sebuah negara.

Caporaso dan David menyimpulkan bahwa negara adalah yang berkuasa atas kontrol atas *public goods*. Artinya, negara harus mengolaborasikan antara pandangan ekonomi politik neoklasik ini dengan pembangunan agar masalahnya dapat diminimalisir. Pada titik ini juga negara akan menghadapi tantangan eksternalitas dalam pandangan neoklasik, yakni kelompok kelas bawah atau tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi. Oleh karena itu, beberapa negara-negara berkembang melakukan *mixed policy* dengan pengertian antara kepentingan negara serta kepentingan individu³⁶.

Menurut Caporaso dan David pandangan ekonomi politik neoklasik ini menekankan kepada individu yang artinya bukan sekedar pemenuhan kebutuhan

³⁶ James A. Caporaso & David. P Levine. 2015. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

public goods saja yang akan dijalankan³⁷. Lebih dari itu, baik dari elite-elite politik, kelompok kepentingan dalam masyarakat, bahkan negara dan kelompok kepentingan akan termotivasi untuk memadukan kepentingan mereka masing-masing. kemudian hal ini akan menjadi lebih luas lagi karena penekanan pandangan neoklasik ini meletakkan baik individu maupun kelompok dan pasar bebas. Maka, konsekuensi yang terjadi peran negara semakin terbatas karena penyesuaian ini.

Meminjam Caporaso dalam Mufti, bahwa pasar diasumsikan sebagai wadah untuk bertransaksi yang sifatnya sukarela antara kepemilikan, kekayaan, properti, dan lain-lain yang keseluruhan bertujuan untuk berebut kepentingan masing-masing.³⁸ Dalam pendekatan ini, transaksi yang dilakukan diasumsikan akan memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi yang bertransaksi. Beberapa pakar ekonomi neoklasik terbagi mejadi 2 generasi. Generasi pertama berusaha untuk mengulas dan memperbaiki teori-teori dari ekonomi klasik tentang pasar. Sedangkan genarasi kedua, menekankan pada sudut pandang pasar itu sendiri. Apabila generasi pertama mengasumsikan pasar adalah gagasan utama dari persaingan sempurna, sebaliknya, generasi kedua neoklasik mengasumsikan bahwa pasar adalah bukan tempat persaingan yang sempurna.³⁹ Generasi kedua ini memiliki pandangan bahwa pasar tempat persaingan tidak sempurna karena didalammnya cenderung memiliki bentuk-bentuk, seperti monopoli, oligopoli, dan kompetisi. Dalam hal ini, letak perbedaan antara klasik dan neoklasik apabila pada pasar sebagai persaingan sempurna, generasi pertama, maka, transaksi jual beli, pelaku kegiatan ekonomi, kuantitas pembeli, kuantitas produksi maupun perusahaan dimana tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga yang ada di pasar. Sedangkan generasi kedua, bahwa mereka melihat pasar sebagai tempat persaingan tidak sempurna dikarenakan jumlah penjual atau produsen terbatas. Hal itu menyebabkan sedikitnya jumlah perusahaan maka, keuntungan ekonomi dari kegiatan mereka akan mudah untuk memengaruhi harga-harga di pasar.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Mufti, M. (2018). *Ekonomi Politik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA. Hal 57-58

³⁹ *Ibid.* Hal 58

Pendekatan neoklasik inilah yang dianggap sejumlah pakar bahwa sangat kompleks. Meminjam Grindle dalam Mufti, bahwa teori ekonomi politik dibedakan dalam 2 kelompok; yakni pendekatan terpusat ke masyarakat dan pendekatan terpusat ke negara, artinya, bahwa dua pendekatan tersebut objek dari pasar tersebut.⁴⁰

Menurut Caporaso dan David cara pandang dari ekonomi politik pendekatan neoklasik ini berdasarkan 2 agenda politik, antara lain⁴¹; Pertama, dalam mengamankan dan memertahankan sistem hak kepemilikan, transaksi yang terjadi bisa secara sukarela. Artinya, kegiatan tersebut dilakukan dengan adanya syarat-syarat untuk pemenuhan atas hak kepemilikan yang bertujuan untuk kesejahteraan individu. Kedua, bahwa dalam agenda politik terkait diluar dari pihak-pihak yang tidak terlibat dalam kontrak namun, mereka terdampak atas kontrak atau transaksi tersebut. Agenda tersebut merupakan bentuk penegakan dari hak kepemilikan itu sendiri namun, agenda politik tersebut bukan sebagai batasan yang harus dipatuhi.

Meminjam Caporasso dalam Mufti, bahwa dalam pendekatan neoklasik ini terdiri dari 5 hal, yaitu hak kepemilikan, eksternalitas, barang publik (*public goods*), Monopoli dan oligopoli, dan ekonomi politik dalam perspektif neoklasik.⁴² Pertama, hak kepemilikan, hak menjadi sebuah peran penting dalam ekonomi. Dalam pandangan neoklasik, bahwa hak kepemilikan bukan sekadar saah satu perangkat dalam kegiatan ekonomi saja namun, hal tersebut salah satu sebuah tatanan dari sistem hukum dalam ruang ekonomi. Hak kepemilikan atau *property rights* diartikan sebagai hak untuk penggunaan, kepemilikan, penjualan, dan akses sumber-sumber kekayaan. Contoh dari kekayaan, yaitu tanah, alat produksi (mesin dan lain-lain), tenaga kerja perusahaan, dan kegiatan konsumsi. Menurut Caporasso dalam Mufti, bahwa hak kepemilikan ini

⁴⁰ Mufti, M. (2018). *Ekonomi Politik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA. Hal 57-58

⁴¹ James A. Caporaso & David. P Levine. 2015. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 201

⁴² *Ibid*. Hal 59-67

berlandaskan 2 teori, yakni⁴³; teori positivis dan hak kepemilikan tidak statis. Pertama, bagi positivis, mereka mengasumsikan bahwa hak kepemilikan sifatnya politik karena menurut mereka hak tersebut didapatkan dari proses-proses politik. oleh karena itu, hak kepemilikan tersebut kapanpun dan dimanapun dapat diganggu gugat. Kedua, hak kepemilikan tidak statis, hak ini merupakan hasil dari transaksi yang berasal dari syarat-syarat agar terjalinnya sebuah hubungan. Namun, pada tahapan selanjutnya hak ini bisa berubah kepemilikannya. Persamaan sekaligus perbedaan dalam kedua teori hak kepemilikan ini pada proses-proses yang menghasilkan sebuah alat tukar. Namun, bedanya pada proses politik bagi positivis, dan transaksi dalam kegiatan ekonomi pada teori kedua hak kepemilikan tersebut.

Kedua, eksternalitas merupakan hasil dari transaksi terhadap pihak ketiga (yang tidak terlibat dalam transaksi) yang dimana mereka tidak mengikuti alur-alur, seperti penentuan sistem harga.⁴⁴ Dari ketidakterlibatan tersebut, pihak ketiga muncul menjadi sebagai efek samping bagi perusahaan. Pihak ketiga yang terlibat di dalam transaksi pada umumnya diberi imbalan bahkan dikenakan biaya. Antara perusahaan dengan masyarakatnya masing-masing memperoleh keuntungan yang sama. Artinya keduanya memiliki timbal balik yang merata serta saling menguntungkan.

Pada hal ini pemerintah masuk dalam korporasi dengan mekanisme denda bahkan subsidi melalui sistem harga, regulasi pemerintah bahkan melakukan ancaman dengan hukum yang berlaku. Artinya, pemerintah intervensi kepada korporasi secara mengikat dan dapat memberlakukan pengadilan di dalamnya. Hal ini bermaksud untuk bagi pihak-pihak yang merasa terugikan oleh korporasi dapat memerkarakan ke pengadilan agar terjadi keseimbangan diantara mereka.

Ketiga, barang publik (*public goods*) dalam pendekatan neoklasik ini barang publik menjadi salah satu alasan kegagalan pasar karena tidak ada hasil

⁴³ Mutfi, M. (2018). *Ekonomi Politik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA. Hal 59-62

⁴⁴ *Ibid.*

dari kegiatan transaksi mereka yang diadakan oleh pasar.⁴⁵ Sifat dari barang publik ini tidak tersaingi maupun tidak menyaingi (noneksklusif dan nonrival). Artinya, kedua sifat tersebut tercipta karena mekanisme bagi hasil atau keuntungan bahkan kerugian dari pihak perusahaan tidak dimiliki. Oleh karena itu, barang publik tercipta yang dilandasi dengan penggunaannya, seperti pendidikan, ganti rugi, dan lain-lain. Artinya, barang publik merupakan sebuah upaya untuk memberikan keuntungan yang sifatnya umum yang dibutuhkan masyarakat.

Keempat, monopoli dan oligopoli, merupakan hasil kegagalan pasar itu sendiri yang artinya penyimpangan yang dilakukan oleh pasar tidak lagi dalam kondisi persaingan yang sempurna karena dominasi beberapa perusahaan saja yang menciptakan monopoli dan oligopoli dalam sebuah pasar.⁴⁶ Ada dua bentuk penyimpangan dalam pasar ketika kondisi pasar sempurna, pertama, dominasi beberapa perusahaan yang dapat mengendalikan pasar di sektor tertentu. Kedua, dominasi beberapa perusahaan dapat menentukan level harga dalam pasar di luar dari yang pada umumnya terbentuk dalam pasar dengan persaingan sempurna. Dalam ekonomi politik neoklasik mekanisme pasar bebas masih belum bisa dikatakan sebagai cara strategi untuk mencegah ketimpangan struktural.

Ekonomi dalam hal ini adalah proses yang dimana sebuah pencarian untuk pemenuhan kepuasan kebutuhan yang tersedia.⁴⁷ Maka, peluang kerja dan institusi politik menjadi garisbawah, bahwa keduanya yang mendasari perilaku pasar dalam tindakannya. Pendekatan neoklasik sendiri berbicara tentang pusat pertukaran yang efisien dalam pasar. Artinya, politik menjadi salah satu instrumen untuk mencapai hal-hal yang tidak bisa dicapai secara efisien oleh pasar. Maka pandangan ini menjadikan bahwa mekanisme tersebut adalah sebuah kegagalan pasar (*market failure*). Kegagalan pasar ini merupakan gagasan utama dari ekonomi politik neoklasik.

⁴⁵ Mutfi, M. (2018). *Ekonomi Politik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA. Hal 59-62

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* Hal 60

Kelima, ekonomi politik dalam perspektif neoklasik, dalam hal ini ekonomi dan politik adalah tentang pemaksimalan keinginan atau kepuasan sebagai kebutuhan dengan keterlibatan peluang-peluang ekonomi dan lembaga politik.⁴⁸ Logika yang mendasari neoklasik ini antara lain keadaan, transaksi individu, yang pada akhirnya negara sebagai institusi politik gagal dalam untuk pemenuhan kesejahteraan. Dalam perspektif ini, gagasan dasarnya adalah kegagalan pasar. Kegagalan pasar yang dimaksud adalah ketika pasar tidak sanggup untuk melakukan pemenuhan peluang keuntungan bagi individu. Beberapa pakar neoklasik berpandangan bahwa hak kepemilikan sebagai barang publik itu dapat dipengaruhi oleh beberapa penentu. Para ilmuwan politik juga yang sejalan dengan pemikiran neoklasik ini berpendapat bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh literatur kepemimpinan, rezim, dan lembaga-lembaga sebagai pengaruh dari kebijakan ekonomi yang diputuskan.⁴⁹ Maka, dapat dikatakan bahwa pentingnya pandangan tentang hak kepemilikan sebagai barang publik dari berbagai tingkatan di lembaga politik menjadi sebuah pembahasan utama dalam penentuan dalam aktivitas pemerintah. Bagi negara Indonesia, pemikiran yang cermat serta strategis pada ketimpangan struktural harus terus dikembangkan. Dengan cara ini, pemahaman mengenai restrukturisasi dalam upaya mengatasi ketimpangan struktural dapat digambarkan. Beberapa kebijakan restrukturisasi dalam konteks makro yang meliputi beberapa bidang dan sektor adalah sebagai berikut.⁵⁰

Pertama, Restrukturisasi pada penguasaan dan kepemilikan asset ekonomi dalam pembentukan kebersamaan melalui “*Triple-co*”, yaitu *co-responsibility*, *co-ownership*, serta *co-determination*. Sebagai upaya dalam membentuk demokratisasi ekonomi pada Lembaga-lembaga usaha ekonomi. Pada penerapan restrukturisasi ini beberapa bentuk perampasan yang dihindari yaitu *cannibal redistribution*, *wild-take over*, dan *savage acquisition*.

⁴⁸ Mutfi, M. (2018). *Ekonomi Politik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA. Hal 59-62

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*. Hal 64-67

Kedua, Restrukturisasi alokatif merupakan restrukturisasi yang berkaitan dengan pengalokasian dana-dana pembangunan yang berasal dari anggaran nasional maupun daerah, baik yang berasal dari Lembaga non-bank maupun lembaga perbankan lainnya. Lembaga-lembaga keuangan bank dan non bank harus dapat menjaga perannya sebagai pemelihara pembangunan, agen restrukturisasi serta agen reformasi dalam upaya mencapai keseimbangan struktural yang optimal.

Ketiga, Restrukturisasi sektoral digunakan dalam mencapai keseimbangan yang lebih dinamis dalam beberapa sektor seperti pada sektor pertanian dan industri, sektor formal modern dan informal tradisional, sektor yang *nongrassroots-based* dengan yang *grassroots-based* sehingga dapat meenuju kepada kokohnya perekonomian rakyat yang dapat menjadi acuan bagi salah satu pilar perekonomian nasional.

Keempat, Restrukturisasi spasial digunakan agar dapat mencapai pemerataan serta keseimbangan pembangunan dan pertumbuhan antara Kawasan Indonesia timur dengan barat, antara desa dan kota, dan seterusnya.

Kelima, Restrukturisasi strategis digunakan untuk memperkokoh kemandirian ekonomi serta mengurangi dependensi, meningkatkan interdependensi resiprokal yang seimbang dan diperlukan dalam memperkokoh ekonomi yang fundamental. Penggunaan restrukturisasi ini akan mengarahkan perekonomian nasional menjadi berakar didalam negeri serta menjadi *resources-based* dan *people-centered*.

Keenam, Restrukturisasi perpajakan. Selain memiliki fungsi sebagai penerimaan negara. Pajak merupakan sarana distribusi. Pajak yang bersifat progresif akan memperkecil kesenjangan. Khususnya dalam kepemilikan barang mewah yang harus dikenakan pajak ini. Sebaliknya, bagi para masyarakat kurang mampu yang membutuhkan subsidi dan proteksi. Pajak adalah insentif bagi kegiatan produktif masyarakat miskin dan disinsentif terhadap barang-barang mewah.

Ketujuh, Restrukturisasi sosial-politik serta budaya. Restrukturisasi ini digunakan dalam konteks demokratisasi politik dan peran masyarakat madani. Restrukturisasi budaya menyangkut hal-hal yang terdiri dari perubahan *mindset*, pemberlakuan *unlearning* terhadap pakem-pakem lama, khususnya restrukturisasi kepada demokratisasi pendidikan rakyat.

Kedelapan, Restrukturisasi pola pikir serta reorientasi budaya digunakan untuk dapat melakukan reorientasi kepada pembukaan akses terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat serta pengembangan terhadap perekonomian rakyat melalui sistem perekonomian yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deksriptif. Metode ini memiliki tujuan untuk mengetahui baik dari kronologi serta bagaimana kekuatan dan proses dari perubahan status Lapindo yang semula diduga merupakan kesalahan perusahaan menjadi status bencana alam yang disahkan oleh pemerintah. Kemudian, penerapan secara metodologis yang tersistematis juga bertujuan agar memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian sesuai kaidah ilmiah. Konsep penelitian dimana terdapat kebenaran ilmiah dan kebenaran non ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah dimana manusia berusaha memperoleh kebenaran yang bisa dipertanggung jawabkan secara rasional dan empiris. Sementara kebenaran non-ilmiah diperoleh manusia dengan memahami fenomena tertentu dengan metode sederhana atau tradisional. Adapun pengertian penelitian, yakni suatu kegiatan penyelidikan yang kritis dalam menanggapi fakta yang ada sehingga memperoleh suatu data yang tepat untuk diteliti.

Meminjam Parson dalam Salim sendiri penelitian adalah pencarian atas sesuatu menggunakan cara yang sistematis⁵¹. Ada tiga penjelasan mengenai sikap seorang peneliti, yakni antara lain objektif, kompeten, dan faktual. Sementara cara

⁵¹ Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. (Sleman : Literasi Media Publishing).

berpikir peneliti adalah skeptis, analitis, dan kritis. Tujuan penelitian dijabarkan dalam lima bentuk diantaranya eksplorasi, deskripsi, prediksi, eksplanasi, dan aksi. Pendekatan kualitatif atau yang sering disebut sebagai penelitian naturalistik adalah gagasan yang sudah lama ada. Peran antropolog pun cukup signifikan dalam mengembangkan metode etnografinya menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan ini juga banyak digunakan oleh ahli folklore, psikolog, linguistik, politik sosiolog, dan lain-lain. Kemudian, secara sederhana, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada alam yang menggunakan metode alamiah. Pengamatan atas alam ini menggunakan metode ilmiah oleh para ilmuwan sehingga kebenaran yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Konteks perilaku dan fenomenologi sosial masyarakat disini bisa dikaji melalui penelitian kualitatif.

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memiliki tujuan, yakni pemahaman tentang perebutan sumber-sumber ekonomi dalam proses perubahan status Lumpur Lapindo. Penelitian ini diupayakan bagi peneliti sekaligus pembaca untuk mengetahui motif kepentingan ekonomi politik seperti apa yang mendorong perubahan status Lumpur Lapindo menjadi status bencana alam.

1.7.2 Unit Analisis

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan serta pengumpulan data yang kemudian akan menjadi tahapan analisis pada Bab III. Kemudian, unit analisis ini akan menjadi variabel yang nantinya akan menjadi mekanisme pengolahan data penelitian. Penelitian yang berjudul “Ekonomi Politik Perubahan Status Lumpur Lapindo Menjadi Status Bencana Alam Di Kabupaten Sidoarjo Pada Masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” ini diamini oleh peneliti memiliki sudut pandang ekonomi politik.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melibatkan informan dan narasumber yang terlibat dalam perubahan status Lumpur Lapindo. Adapun kriterianya sebagai berikut:

1. Informan yang baik individu maupun kelompok yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung.
2. Informan utama, yakni Informan yang berasal dari salah satu institusi yang diyakini berkaitan dengan pembahasan.

Unit analisis ini merupakan subjek penelitian. Yang kemudian, peneliti akan memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan realita lapangan. Dalam penelitian ini, informan peneliti, yaitu:

1. Harsa Harjana selaku (*Ex*) *Vice President Operations* PT. Lapindo Brantas Inc.
2. Dr. Rohman Budijanto (Staf Khusus Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bidang Hukum dan Kerjasama Luar Negeri). Ia sebelumnya pernah menjadi Redaktur Khusus Semburan Lumpur Sidoarjo selama 2 tahun.
3. Sumi Harsono selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo pada periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo 2019-2024. Ia juga sebagai salah satu dewan yang mengamati perkembangan semburan lumpur Sidoarjo pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
4. Fuad merupakan seorang warga terdampak semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo sekaligus kepala rumah tangga. Ia awalnya ia menekuni profesi sebagai buruh pabrik di salah satu perusahaan, Unilever, yang berlokasi di Kecamatan Porong.
5. Rendra merupakan perwakilan sekaligus salah satu pengelola dari kelompok paguyuban wisata semburan lumpur Sidoarjo. Ia sebelumnya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Unit analisis dalam penelitian ini yang disusun adalah narasumber utama dari keterlibatannya dalam perubahan penentuan perubahan status Lumpur Lapindo dan dampak yang terjadi kepada warga terdampak di Kabupaten Sidoarjo pada masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

1.7.3 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti yang berjudul “Ekonomi Politik Perubahan Status Lumpur Lapindo Menjadi Status Bencana Alam Di Kabupaten Sidoarjo Pada Masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” adalah penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penelitian kualitatif merupakan sebuah rangkaian prosedur yang bertujuan untuk mendapatkan data berdasarkan hasil dari data deksriptif objek yang diteliti. Kemudian, menerjemahkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis baik perilaku maupun sikap politik yang tidak diperoleh dalam dengan metode penelitian kuantitatif. Maka, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menerjemahkan baik suatu peristiwa maupun fenomena yang sudah terjadi yang kemudian dalam penejelasanannya dapat dicurahkan melalui temuan-temuan, data, dan interpretasi bahkan informasi seerta kajian dari data primer maupun data sekunder.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil dari peristiwa di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Adapun lokasi konkrit dari penelitian ini adalah Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur⁵².

1.7.5 Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian berasal dari buku literatur dan informan yang tersedia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

⁵² Lokasi semburan lumpur lapindo

kualitatif, dalam penelitian ini baik buku literatur maupun informan atau narasumber yang akan menjadi sumber informasi. Adapun daftar narasumber yang akan menjadi objek pengambilan data, yakni;

1. Harsa Harjana sebagai *Ex Vice President Operations* Lapindo Brantas Inc.
2. Dr. Rohman Budijanto (Staf Khusus Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bidang Hukum dan Kerjasama Luar Negeri). Ia sebelumnya sebagai Redaktur Khusus (JPIP) Semburan Lumpur Sidoarjo selama 2 tahun (Tahun 2006-2007).
3. Sumi Harsono selaku perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Anggota DPRD Fraksi PDIP pada periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia pada saat itu termasuk bagian dari Tim. Ia sekarang menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo 2019-2024. Ia juga sebagai salah satu dewan yang mengamati perkembangan semburan lumpur Sidoarjo pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
4. Fuad Selaku ketua paguyuban pengelolaan wisata semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo sekaligus kepala rumah tangga. Ia merupakan warga terdampak, awalnya ia menekuni profesi sebagai buruh pabrik di salah satu perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Porong.
5. Rendra merupakan perwakilan sekaligus salah satu pengelola dari kelompok paguyuban wisata semburan lumpur Sidoarjo. Ia sebelumnya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari metode penelitian kualitatif menggunakan beberapa cara, yaitu wawancara dengan responden yang sesuai. Kemudian, peneliti juga menyajikan beberapa sumber-sumber data, seperti buku-buku yang bersangkutan, media daring yang menyajikan data sesuai dengan penelitian. Ada 3 tahapan dalam teknik pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Pertama, *wawancara*, dalam penelitian kualitatif, data prioritas ialah wawancara langsung dengan responden yang bersangkutan dengan penelitian. Kemudian, peneliti juga menyusun pedoman wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan dikehendaki pada saat melakukan kegiatan tersebut. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dalam kegiatan wawancara agar setiap poin yang telah disusun tidak keluar dari topik atau *out of topic*.

Kedua, *observasi*, dalam penelitian kualitatif, observasi merupakan salah satu tahapan cara yang dilakukan dengan sebuah pengamatan secara langsung kepada subjek yang diinginkan oleh peneliti. Kemudian, pengamatan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dari penelitian terhadap subjek penelitian.

Ketiga, *studi pustaka*, dalam penelitian kualitatif, studi pustaka merupakan sumber data yang berasal dari buku (literatur), berita, artikel, dan responden. Mereka tidak lain akan menjadi sumber rujukan prioritas dalam menghasilkan penelitian dapat dikatakan empiris serta hipotetik.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2014, pp. 31–33) terdiri dari beberapa tahapan, yakni kondensasi data, penyajian data, verifikasi data.⁵³ Kondensasi Data, reduksi data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan/atau mengubah data

⁵³ Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. (Bandung : Alfabeta) Hal 404-412.

yang muncul dalam kumpulan tulisan yang lengkap (*body of the text*) dari catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Dengan mereduksi data, data menjadi lebih kuat.

Penyajian Data, secara umum, *penyajian* maksudnya adalah kumpulan informasi terkompresi dan terorganisir yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan tindakan. Pada umumnya, penyajian data dalam penelitian kualitatif yakni dengan kumpulan teks panjang dan melelahkan untuk dibaca. Namun, penyajian data tidak lah harus selamanya dibatas oleh teks, penggunaan variasi tabel, grafik, dan gambar dapat lebih membantu agar informasi tersampaikan dan terserap secara lebih cepat dan mudah.

Verifikasi Data, verifikasi data bisa dilakukan dengan setidaknya seperti mengingat kembali apa yang dilakukan di lapangan, bagaimana hasil tersebut ketika dituliskan, sesuai atautkah tidak. Verifikasi bisa sangat singkat maupun sangat rumit, dengan argumentasi yang panjang untuk mengembangkan “konsensus” intersubjektif atau dengan upaya ekstensif untuk mereplikasi temuan dalam kumpulan data lain. Makna yang muncul dari data harus diuji, masuk akal atau tidak, bagaimana validitasnya, apakah dapat dikonfirmasi. Jika tidak, maka data tersebut harus ditanggalkan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan menghimpun data yang terdapat di lapangan yang kemudian akan diolah. Kemudian, dalam analisis data kualitatif ini berguna untuk memudahkan peneliti untuk mendapatkan sumber-sumber data dengan penyesuaian dengan kondisi lapangan serta meminimalisir pengaruh dari sumber-sumber data lain yang tidak ada kesinambungan dengan kebutuhan penelitian. Hal tersebut merupakan landasan utama bagi sebuah penelitian agar mudah dipertanggungjawabkan tingkat validitas data-data yang diperoleh.

Dalam analisis data, peneliti membagi tiga urutan analisis yang bertujuan untuk menghasilkan hasil analisis yang sesuai dengan fakta, antara lain; *Pertama*,

penyederhanaan atau reduksi data bahkan pengelompokan data agar lebih sesuai dengan apa yang ingin peneliti tekankan. *Kedua*, penyajian data berdasarkan transkrip yang diperoleh melalui wawancara dengan responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Kemudian, penyajian tersebut juga disertakan data primer dan data sekunder untuk mendukung kebutuhan dari penelitian. Hal ini bertujuan untuk dapat memudahkan antara hasil dari lapangan dengan kerangka konseptual dan kerangka teori. *Ketiga*, langkah ini merupakan langkah akhir dari tekni analisis data, yakni dengan penarikan kesimpulan dari keseluruhan data serta mengetahui apa saja yang memengaruhi dan menghambat dari sebuah penelitian.